



# Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

## Anggaran 2021



## 2020, Jangan Berlalu Tanpa Resolusi



Foto: freepik.com

Penghujung tahun menjadi *moment* untuk merefleksikan diri. Mengingat kembali setiap perjalanan yang dilewati. Menilik progres yang telah dan belum tercapai. Saat yang tepat untuk mengevaluasi diri. Apakah kita telah menjadi pribadi beruntung atau rugi?

Sebagai bahan refleksi, ada satu pesan hikmah dari Imam Ghazali. Dalam sebuah dialog, beliau bertanya pada murid-muridnya "Apakah yang paling jauh dari diri kita?" Murid-muridnya menjawab: "Negeri Cina, Bulan, Matahari, dan Bintang." Sang Imam berkata: "Yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu."

2020 yang telah kita lewati seyogyanya dapat dipetakan. Kesuksesan yang kita raih, pertahankan dan tingkatkan. Kegagalan yang dialami, evaluasi dan perbaiki. Jangan sampai terbuai dalam bayang kesuksesan dan tidak pula terpuruk karena kegagalan.

Kini saatnya menyusun resolusi 2021. Apakah yang hendak kita capai? Dengan terus meningkatkan kualitas diri, kita tentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan. Harapan

yang baik harus dipersiapkan secara matang, hal itu sekaligus wujud penghargaan terhadap waktu.

Bagi redaksi Cirebon Katon. 2020 menjadi tahun istimewa, penuh pembelajaran. Dinamika yang dihadapi menjadi sarana pendewasaan. Kami bersyukur mampu melewati tahun ini dengan baik. Meski masih banyak kekurangan dan hal-hal yang harus diperbaiki.

2021, kami akan membuat kejutan bagi para pembaca setia Cirebon Katon. Resolusi Cirebon Katon adalah menjadi majalah DPRD Kabupaten Cirebon yang lebih kreatif, inovatif, dan edukatif. Menyajikan informasi seputar dewan dan daerah yang menginspirasi.

Akhirnya, kami haturkan terima kasih kepada segenap pimpinan, anggota dewan, dan sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon atas bimbingan dan arahan. Juga seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan waktu dan datanya. Kolaborasi yang baik menghasilkan karya terbaik.

Sampai jumpa di 2021. Salam Cirebon Katon!

### Pembina/Penasehat :

**H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si**  
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Rudiana, SE**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Teguh Rusiana Merdeka, SH**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Drs. H. Subhan**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

### Pengarah :

**Muklisin Nalahudin, SH, MH.**  
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

**Munawir, SH.**  
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

**Abdul Rohman**  
(Ketua Komisi 1)

**Mad Saleh**  
(Ketua Komisi 2)

**H. Hermanto, SH**  
(Ketua Komisi 3)

**Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM**  
(Ketua Komisi 4)

### Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

**Ikin Asikin, S.Sos, M.Si**  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

### Wakil Pimpinan Redaksi :

**Drs. Raden Chaidir Susilaningrat**  
(Kabag persidangan)

**Drs. H. Sucipto, MM**  
(Kabag Perundang-undangan)

### Redaktur Pelaksana :

**Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si**  
(Kasubag Humas dan Protokol)

### Redaksi Ahli :

**S. Yudi**

### Penyunting :

**Wiwin Winarti, S.IP**  
(Kasubag Rapat dan Risaiah)

**Ardiles Afla Jatiwanto**  
(Kasubag Rumah Tangga)

### Redaktur :

**IA Fazri**

### Reporter :

**Firman • Maulana • Adi • Yusuf • Mahardika**

### Fotografer :

**Alfian**

### Desain Grafis :

**Boyke Datu • Andri**

### Data dan Riset :

**Oman • Ihsan**

### Distribusi :

**Adiw**

### Korespondensi :

**redaksi.cika@gmail.com**

### Penerbit :

**Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**  
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon  
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



## 04 | FOKUS

APBD 2021

Prioritaskan Kelanjutan Program Populis



## 14 | KILAS

Perlu Skema Penguatan Dispusipda



## 18 | PUBLIKA

Tidak ada Palang Pintu Kereta Api



## 20 | LENSEA

Kaleidoskop 2020



## 22 | DINAMIKA KOMISI

Penegakan Perda Protokol Covid-19

### 24 | Komisi II:

Urai Masalah Suplai Air Baku

### 26 | Komisi III Dukung Program Parkir Khusus

### 28 | Komisi IV Kaji Kenaikan Anggaran Pendidikan



## 30 | PROFIL

Fraksi Partai Gerindra:  
Berjuang Demi Martabat Masyarakat  
Kabupaten Cirebon



## 33 | INSPIRASI

Kebun Pisang Bumdes Sindang Kempeng  
Berdayakan Warga

## 36 | POTENSI

Sarwajala;  
Potensi Wisata Pantai Cirebon Utara

## APBD 2021

# Prioritaskan Kelanjutan Program Populis

DPRD Kabupaten Cirebon prioritaskan program populis yang belum terselesaikan maupun terealisasi. Selain itu, ada pula program sinkronisasi kebijakan nasional.



Foto: foto: ihsan/dk

Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon

Siang itu, kursi rapat paripurna hampir tak kosong. Separuh lebih anggota dewan hadir mengesahkan bersama. Mohammad Lutfi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menutup rapat paripurna. Ia pun berdiri dan melanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengesahan APBD bersama Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

Dengan begitu, semula Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kini menjadi APBD Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama.

“Dalam paripurna pengesahan APBD tahun 2021 telah selesai. Sekalipun sedikit terlambat, akibat sebelumnya kantor DPRD itu lockdown,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka.

Dalam APBD Tahun 2021 menjelaskan, total Pendapatan Daerah (PD) Kabupaten Cirebon sendiri berada di angka Rp 3,3 triliun atau Rp 3.387.122.666.240,00. Itu dihasilkan dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon senilai Rp 671,6 miliar atau Rp 671.643.204.240,00. Sedangkan pendapatan terbesar merupakan sumbangsih APBN Pendapatan

Transfer sejumlah Rp 2,7 triliun atau Rp 2.715.479.462.000,00.

Teguh mengatakan, pada tahun ini, jumlah PAD yang diharapkan tidak maksimal akibat pandemi melanda. Menurutnya, hal ini disebabkan pendapatan PAD terbesar dari sektor perhotelan dan wisata tak mampu bergeliat.

“Belum lagi para pelaku UMKM, pengusaha yang tidak sedikit mengalami gulung tikar akibat sepi pengunjung,” ujarnya.

Sejauh ini, dalam draft APBD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon telah memproyeksikan Belanja Daerah secara total dengan angka Rp 3,47 triliun untuk tahun 2021. Hal itu meliputi Belanja Operasi di angka Rp 2,5 triliun, yang terbagi dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah serta Belanja Bantuan Sosial.

Kemudian, Belanja Modal berada di angka Rp 178,5 miliar, meliputi: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Sedangkan dalam merinci Belanja Tidak Terduga, Pemerintah Kabupaten Cirebon menganggarkan di angka Rp 28,2 miliar. Terakhir, Belanja Transfer yang meliputi: Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan di angka Rp 670, 1 miliar. Itu artinya terdapat surplus atau defisit anggaran senilai Rp 83,2 miliar, ditambah pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 5,8 miliar.

Namun, itu telah tertutupi melalui Penerimaan Pembiayaan sisa lebih anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, senilai Rp 89 miliar. Sehingga SiLPA APBD Kabupaten Cirebon TA 2021 ini Nol atau Nihil. Dengan kata



lain, tidak ada anggaran lebih dari semua sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Kalau dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2020. Dalam sektor Pendapatan Daerah telah mengalami penurunan. Sedangkan untuk PAD dari yang semula Rp 644 miliar naik menjadi Rp 671 miliar.

### Skala Prioritas

Teguh menerangkan, dalam penganggaran APBD 2021, ada skala prioritas anggaran pada tahun depan berkenaan dengan kebijakan otonomi daerah. Menurutnya, beberapa program skala prioritas yang telah disetujui merupakan kelanjutan dari tahun 2020 yang belum dapat

diselesaikan maupun direalisasikan akibat *refocusing*.

“Misalnya soal sampah, normalisasi sungai hingga irigasi. Itu akan tetap dilanjutkan karena menyangkut hajat banyak orang,” ungkapnya.

Sedangkan, program yang bersifat sinkronisasi terhadap kebijakan pemerintah pusat ada 3 aspek: Kesehatan, Jaringan Pengaman Sosial serta Pemulihan Ekonomi, juga akan tetap dilakukan.

“Kemarin beberapa SKPD ada yang mengacu pada poin yang diprioritaskan pemerintah pusat,” jelasnya.

Teguh bilang, itu menjadi dasar pijakan dalam menyusun program. Apalagi APBD



Kabupaten Cirebon 60 persen lebih merupakan sumbangsih Pendapatan Transfer APBN.

**Klasifikasi Sub Anggaran**

Dalam rancangan APBD Tahun 2021, setidaknya Pemkab Cirebon telah mengklasifikasikan berdasarkan sub urusan pemerintahan daerah dan organisasi. Pertama, pada Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan, Pemkab Cirebon mengalokasikan senilai Rp 1 triliun. Ini menjadi amanat undang-undang agar penyerapan untuk pendidikan haruslah 20 persen dari pagu anggaran.

Kemudian, berkaitan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan berada di angka Rp 698,7 miliar, urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 174,5 miliar. Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat senilai Rp 48,1 miliar.

Sedangkan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemda juga telah mengalokasikan senilai Rp 15,7 miliar, Urusan Pemerin-

tah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp 228,3 miliar, Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja Rp 14 miliar, Urusan Pemerintah Bidang Pangan 8,3 miliar, serta Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup di angka Rp 31,7 miliar.

Selain itu, dalam APBD untuk urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemkab telah mengalokasikan Rp 19,9 miliar. Kemudian urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 8,1 miliar, Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 16,7 miliar. Sedangkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rp 57,1 miliar.

Selanjutnya, dalam urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika Rp 12,8 miliar, urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah senilai Rp 5,2 miliar, Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal Rp 9,5 miliar, Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan Rp 33,9 miliar dan

Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan sejumlah Rp 10,3 miliar

Pemerintah Kabupaten Cirebon juga merencanakan pada Urusan Pemerintahan Pilihan senilai Rp 100,1 miliar, Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Rp 10,6 miliar, Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Rp 57,3 miliar, Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rp 32 miliar, dan Unsur Pendukung Bidang Pemerintahan Rp 137,6 miliar.

Sedangkan untuk unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ada di angka Rp 783,8 miliar, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Rp 22,2 miliar, Unsur Kewilayahan Kecamatan Rp 128,4 miliar. Terakhir, Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemkab telah menencanakan sejumlah Rp 13 miliar.

Teguh berharap program yang akan dijalankan oleh SKPD akan mampu menaikkan PAD Kabupaten Cirebon. Sehingga, menurutnya perlu membuka kran investasi seluas-luasnya.

“Sebelum pandemi Covid 19 ini, baik eksekutif dan legislatif, sejatinya sudah sering melakukan komunikasi dan koordinasi intens melalui sarana olahraga. Intinya semangat ini dalam rangka bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon sesuai visi misi bupati,” papar Teguh.

Teguh berharap, APBD 2021 itu bisa menelurkan program yang berdampak pada masyarakat luas. Selain itu perlu terobosan baru dalam merealisasikan program. Ia berpendapat seharusnya dalam RPJMD bupati perlu titik fokus yang digarap dalam setiap tahunnya.

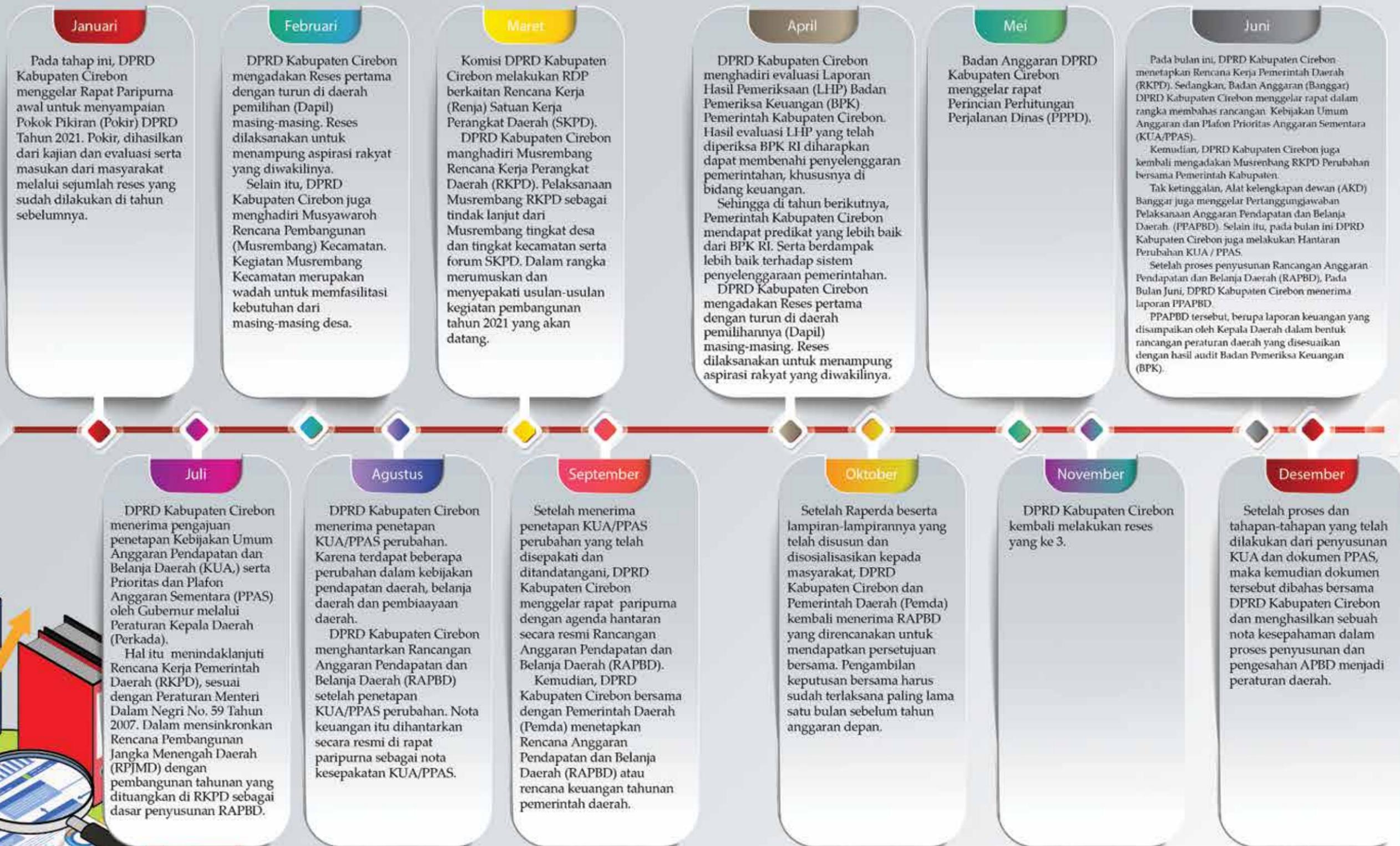
“Misal tahun depan fokus sampah. Ya sudah fokuskan dulu ke arah itu. Ketika sudah selesai baru ke program lainnya,” pungkasnya.

**BERIKUT ALOKASI APBD KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Jumlah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.056.596.359.507,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.056.303.165.698,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	698.710.606.531,00
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	174.560.237.620,00
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	63.110.759.120,00
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	63.110.759.120,00
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.734.543.879,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	228.331.990.570,00
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.062.869.652,00
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.376.052.425,00
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	31.798.860.663,00
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19.970.374.081,00
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.147.367.208,00
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.776.103.065,00
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	57.133.888.752,00
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.892.919.054,00
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.235.691.065,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.554.633.526,00
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	33.989.888.293,00
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	10.393.342.786,00
21	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	100.127.561.187,00
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.672.506.322,00
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	57.379.059.932,00
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	32.075.994.933,00
25	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	137.698.149.042,00
26	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	783.813.029.232,00
27	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	22.218.309.774,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	22.218.309.774,00
29	KECAMATAN	128.444.886.217,00
30	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.092.380.711,00

# Proses Penyusunan APBD

Dalam mengesahkan APBD terdapat tahapan yang harus dilakukan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Berikut Cirebon Katon telah merangkum tahapan yang dilakukan oleh DPRD bersama bupati.



## Teguh Rusiana Merdeka: Fokus Peningkatan PAD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan melalui peraturan daerah yang dibahas melalui rapat paripurna. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan hingga pengesahan APBD Tahun 2021. Reporter Cirebon Katon pun mewawancarai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka. Berikut petikannya:



Foto: foto: Ihsan/dk

### Bagaimana dinamika dalam proses pengesahan APBD tahun 2021 ini?

Dinamikanya hanya karena pandemi, ruang tatap muka sedikit dikurangi. Bahkan sebelum

pengesahan saja, ada problem Bupati terinfeksi Covid 19. Seminggu sebelumnya kantor DPRD juga sempat *lockdown*. Jadi sedikit terhambat.

Kalau program yang akan

dijalankan untuk tahun depan, tentu lebih konsentrasi ke arah pasca pandemi ini. Namun tidak semuanya, beberapa permasalahan di Kabupaten Cirebon yang dalam konteksnya *urgent*

akan segera dibenahi. Contoh masalah sampah. Tahun 2020 masalah sampah tidak bisa diselesaikan secara tuntas, tapi tahapannya kita laksanakan. Artinya, kita akan secara bertahap untuk menanganinya.

Kemudian, kami legislatif dan eksekutif juga bersepakat, hal-hal yang sifatnya krusial dan berpengaruh pada kemaslahatan banyak orang itu kita dukung dan kita dorong sepenuhnya. Seperti di wilayah kami, Dapil 5 itu ada beberapa aliran sungai dan irigasi yang dipakai untuk mengairi sawah tapi tidak mengalir dengan baik. Ketika musim hujan, banjir. Sedangkan kalau kemarau malah kekeringan, susah mendapatkan air. Padahal sungai itu menaungi 3 kecamatan untuk perairan.

Dalam proses penganggaran untuk tahun 2021 itu, tidak sedikit merupakan kelanjutan program-program di tahun 2020 yang tidak terlaksana karena terkena *refocusing*. Akhirnya beberapa SKPD ada yang coba melanjutkan program dari tahun sekarang, dan ada juga yang diselaraskan dengan tahun 2021. Jadi tidak mengganti semuanya, hanya yang menurut SKPD krusial tetap akan dilanjutkan programnya di tahun depan.

### Lalu, apa yang menjadi skala prioritas untuk APBD di tahun 2021 ?

Kalau secara prioritas keinginan kita memang tidak bisa dipaksakan, kenapa? Karena pertama, terbentur masalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bupati. Kita tidak bisa meloncat dari RPJMD yang sudah dirumuskan oleh Bupati Cirebon, karena itu dasar utama untuk kita melakukan proses kebijakan apapun.



Teguh Rusiana Merdeka

Kedua, kita juga tidak bisa meloncat dan memaksakan karena dalam kondisi yang seperti ini. Sebenarnya ada beberapa program prioritas yang ingin direalisasikan. Namun secara bertahap. Seperti pengentasan sampah, awalnya target selesai sampai akhir 2020. Tapi belum bisa selesai. *Inshaallah* tahun berikutnya bisa diselesaikan. Dan ada beberapa program lagi yang memang tidak bisa saya sebutkan semuanya, misalnya normalisasi irigasi dan yang lainnya.

### Artinya, anggaran oleh SKPD tahun lalu tidak semuanya terserap?

Setahu saya, tidak ada yang semuanya terserap. Per tanggal

20 yang terakhir itu memang belum terserap semuanya rata-rata. Karena kemarin juga sempat *lockdown*. Sehingga sampai ke arah detail itu saya belum mengetahui. Tapi saya meyakini tidak semuanya 100 persen anggaran bisa terserap. Pasti ada SILPA.

### Dalam APBD 2021 nilai belanja operasi berada di angka tertinggi. Bagaimana tanggapan Anda?

Saya pikir beban covid-19 terlalu berat. Akhirnya hanya beberapa persen saja yang bisa dialokasikan untuk pembangunan. Nah dalam tahap ini, kami coba membenahi satu per satu. Kita berharap Rp 1 rupiah pun dari APBD harus diefektifkan

dalam bentuk apapun.

Belanja Operasi juga menyangkut kebutuhan hajat hidup banyak orang. Kita tidak bisa mengesampingkan upah orang yang bekerja karena fokus pada program pembangunan. Jadi memang dalam tahap pembenahan ini, baik antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat Kabupaten Cirebon telah berkomunikasi dengan baik.

**PAD Kabupaten Cirebon tahun 2020 masih berada di angka Rp 600 milyar. Apa yang akan dilakukan agar PAD Kabupaten Cirebon bisa meningkat?**

Nah, ini yang menjadi konsentrasi sebenarnya. Pertama, ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa pungkiri akibat pandemi ini yang berpengaruh terhadap penghasilan PAD Kabupaten Cirebon. Namun kita tetap harus optimis.

Pada tahun sebelumnya, industri hotel itu salah satu penyumbang PAD terbesar. Tapi akibat pandemi, pengunjung dari luar daerah tidak banyak yang datang bahkan hampir tidak ada. Kemudian, sektor pariwisata, walaupun kita tidak punya pariwisata yang besar. Tetapi keberadaan pariwisata di sekitar kabupaten kita turut serta meningkatkan PAD kita.

Selain itu, sektor UMKM. Kuliner di Kabupaten Cirebon di tahun ini tidak sedikit yang tutup akibat sepi pengunjung. Akhirnya, tidak heran ketika nilai PAD kita tahun ini jauh dari yang diharapkan.

Sehingga, pada tahun yang akan datang, kita memiliki inisiatif akan fokus pula pada tataran sentra wisata, agrowisata. Misalnya di daerah Greged dan Sumber. Beberapa daerah yang

pernah saya kunjungi mempunyai potensi wisata yang bagus. Nah ini yang akan kita seriusi, dimulai dengan perencanaannya yang matang. Saya yakin akan mendatangkan PAD yang jauh lebih besar nilainya.

Terakhir, wisata makam Sunan Gunung Jati. Ketika kondisi normal, dalam setiap harinya para pengunjung bisa mencapai ribuan. Bahkan kalau malam Jumat itu bisa lebih. Tetapi tahun ini malah sepi pengunjung akibat pembatasan kerumunan.

Sehingga, masyarakat kita banyak yang rugi dan tidak bertahan. Toko, hotel dan lainnya kan sepi juga. Kita berharap mudah-mudahan pandemi cepat selesai, agar kita bisa mengejar sesuai cita-cita dan visi misi bupati.

**Berarti tahun depan, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan fokus pembenahan terhadap sektor pariwisata, begitu ya?**

Tidak di sektor pariwisata saja, tapi di semua sektor secara bertahap. Hanya saja sektor pariwisata menjadi keharusan. Saya mencontoh Kabupaten Banyuwangi itu bisa mendapatkan predikat yang baik, karena memang setiap desa punya pariwisata. tapi tidak bisa juga kita terapkan untuk seluruh desa di Kabupaten Cirebon.

Nah, kita juga berencana meningkatkan PAD melalui kawasan industri yang sudah dicanangkan di wilayah timur Cirebon. Namun itikad Perda RTRW belum diturunkan dengan RDTR. Sampai detik ini terbukti RDTR saja belum ada.

Seharusnya kita sudah bisa mulai go, tapi karena hal-hal yang belum menemui kesamaan persepsi akhirnya terhambat. Ini menjadi PR semuanya, agar dapat berkomunikasi dengan

baik dan menemukan pola yang seimbang. Artinya frekuensinya harus sama. Karena kalau tidak sama memang susah, kita mau membangun Cirebon. Apa yang mau dibangun terlebih dahulu? Kalau tidak ada kesepemahaman.

**Lalu, selain itu adakah sinkronisasi program di Kabupaten Cirebon sendiri terhadap program pemerintah nasional untuk tahun depan?**

Tentu ada, Pak Jokowi itu sudah meluncurkan 3 kebijakan yang harus dijadikan dasar untuk wilayah kabupaten, kota atau provinsi dalam APBD. Pertama, Pemulihan Kesehatan, kita harus melakukan program pemulihan kesehatan dalam menghadapi Covid 19. Baik menyiapkan infrastruktur tenaga kesehatan, kesiapan rumah sakit maupun vaksinasi.

Kedua, Jaringan Pengaman Sosial, berkaitan bantuan bagi terdampak pandemi tetap harus dilaksanakan. Ketiga, Pemulihan Ekonomi, salah satunya sektor UMKM. Dalam proses APBD kemarin ada beberapa poin yang mengacu pada pemulihan ekonomi.

Pada intinya, harapan kami Perda APBD Tahun 2021, semuanya bisa terserap dengan baik dan mampu menggeliatkan kemajuan daerah. Baik dari sisi ekonomi, infrastruktur. Karena memang tidak ada satu orang pun, lembaga dan komunitas apapun yang pernah mengalami kondisi seperti ini.

Jadi saya pastikan tidak ada orang yang pernah punya pengalaman dalam pandemi. Artinya, semoga hasil dari kebijakan yang dikeluarkan dari Pemkab dan DPRD melalui APBD, bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

# Perlu Skema Penguatan Dispusipda

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cirebon mengenai pengelolaan arsip.



Foto-foto : doki sethwan

# Komisi II Dorong Pembangunan Embung Winduhaji

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi BBWS CC Kota Cirebon, mengenai kondisi Bendungan Karet Kumpulkuista sebagai sumber air PDAM, dan tindaklanjut rencana pembangunan Embung Winduhaji.



Foto-foto : doki sethwan

# Rencana Penataan Infrastruktur Pedesaan

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Kabupaten Pemalang mengenai penataan Infrastruktur Pedesaan untuk diterapkan di Kabupaten Cirebon.



Foto-foto : dok sekwan

# Menggali Proses Perizinan dan Pengawasan Lingkungan

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi DPRD Kabupaten Indramayu mengenai Perizinan dan Pengawasan Lingkungan



Foto-foto : dok sekwan

## Tidak Ada Palang Pintu Kereta Api



Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang terhormat Bapak dan Ibu dewan. Saya sering berkendara ke berbagai desa untuk COD pesanan olshop lewat jalan penghubung melewati rel kereta api, tapi kok saya lihat banyak yang tidak ada palang pintunya?

Di desa saya sendiri pernah ada mobil yang tertabrak kereta. Pernah juga ada kejadian orang yang biasa menyebrangkan kendaraan di rel terserempet kereta api, hal itu

dilakukan demi menjaga orang lain. Bagaimana pemerintah menangani itu? Apakah palang pintu perlintasan kereta api cuma ada di jalan-jalan besar? Padahal kan sama-sama berbahaya jika tidak ada pembatas rel kereta dan warga yang melintas.

Semoga dapat ditindak lanjuti oleh dinas terkait, terima kasih.

**Puput (22) – Penjual Online Shop - Mundu.**

## Penghubung Desa Tonjong – Tanjong Anom Rusak Parah



Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Saya Ade (23) warga desa Tonjong kecamatan Pasaleman. Saya bekerja sebagai supir pengangkut barang.

Setiap pagi, aktivitas saya yaitu mengirimkan barang ke pasar-pasar. Dalam perjalanannya, saya melewati jalan berlubang yang sangat panjang. Kira-kira sepanjang 1 kilo. Tentunya jalan berlubang tersebut membuat kerja-kerja saya sebagai supir menjadi terhambat.

Jalan tersebut merupakan jalur penghubung antara Desa Tonjong dan Tanjong Inong. Akibat jalan berlubang itu, sudah banyak pengendara yang jatuh. Parahnya, sudah bertahun-tahun jalan tersebut tak kunjung diperbaiki.

Mohon kiranya kepada Pemerintah Desa setempat dan Dinas terkait untuk segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak parah itu, dan kepada bapak dan ibu dewan agar bisa segera menindaklanjuti.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

**Ade (23) - Sopir- Pasaleman.**

## Rencana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Yang Terhormat Bapak dan Ibu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

Kami sudah bersosialisasi kepada warga soal sampah. Namun, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan di desa kami. Terlebih, di sungai dan jalan, banyak sampah yang tertumpuk. Hal itu terjadi karena warga tak punya pilihan lain untuk membuang sampah, karena belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Maka kami berharap Bapak dan Ibu anggota dewan bisa meneruskan aspirasi kami agar ada penyediaan TPA atau pengelolaannya.

**Ahmad (20) – Organisasi Masyarakat - Babakan**



# Design Baru untuk Semangat 2021

Alhamdulillah, satu tahun berlalu. Sepuluh edisi pada 2020 telah diterima pembaca setia Cirebon Katon. Semoga mampu memberi suguhan penuh makna.

Kini kami sedang menyiapkan persembahan majalah untuk 2021. Diawali dengan pembahasan design sampul majalah. Bersiaplah pembaca setia untuk menyambut Majalah Cirebon Katon yang lebih *fresh* dan keren.



# Penegakan Perda Protokol Covid-19

Warga Kabupaten Brebes yang melanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi fisik seperti *push up* dan menyapu jalan. Hal ini dilakukan atas dasar instruksi Perbup. Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon?



Foto: foto: dok.sekretan

**K**omisi I DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi DPRD Kabupaten Brebes. Mereka menggali informasi tentang Penegakan Perda Protokol Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya persiapan pemberlakuan Perda Protokol Covid-19 di Kabupaten Cirebon.

Kedatangan mereka disambut Wakil Ketua Komisi

I DPRD Kabupaten Brebes Moch Iqbal Tanjung. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes Supriyadi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Edy Hermawan. Mereka berdiskusi soal penegakan Perda Protokol Covid-19.

Iqbal mengatakan, untuk masyarakat yang hendak keluar rumah diwajibkan memakai masker.

Selain itu, masyarakat dihimbau untuk rajin cuci tangan, berjaga jarak, serta menjaga kesehatan di lingkungannya masing-masing. Hal itu dilakukan sebagai upaya preventif.

Sementara itu, Edy mengatakan, untuk menekan angka penyebaran virus corona (Covid-19), Satpol PP Kabupaten Brebes telah melakukan operasi yustisi. Kegiatan dilaksanakan bersama tim gabungan TNI dan Polri.

Edy menegaskan, bagi warga yang melanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi fisik seperti *push up* dan menyapu jalan. Selain itu, dimungkinkan diterapkan sanksi denda.

“Penerapan sanksi ini bukan tujuan utama. Namun upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat tentang protokol kesehatan. Ini berguna untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Edy khawatir jika kasus covid 19 di Kabupaten Brebes akan semakin bertambah. Karena itu, ia berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya mengabaikan protokol kesehatan.

Operasi ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 64 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. •Dul



## Komisi II: Urai Masalah Suplai Air Baku

Kerjasama suplesi PAM untuk Cikalahang telah disepakati dengan 40 liter per detik. Hanya saja, masih banyak perusahaan swasta di Kabupaten Cirebon yang mengelola air baku layaknya PDAM.



Foto: foto: dok setman

Dalam rangka menjalin keberlangsungan kerjasama kaitan Suplai Air Minum. Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon bersama PAM Tirtajati Kabupaten Cirebon mengunjungi Perumda Air Minum (PAM) Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan. “Kerja sama sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2009 dengan MoU 75 liter per detik (lt/dt). Semula hanya terserap 20 lt/dt, kemudian 30 lt/dt, hingga sekarang 65 lt/dt. Jadi kami mempunyai *idle* kapasitas sambil menunggu pengembangan terlebih dahulu,”

kata Suharyadi, Direktur Utama PAM Tirtajati.

Senada dengan itu, Direktur Utama PAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan Deni Erlanda, menjelaskan, PAM Tirtajati baru mampu menyerap 60-65 lt/dt, karena belum siap menerima debit 75 lt/dt. Selain itu, kata Deni, kerja sama suplesi 40 lt/dt untuk Cikalahang juga telah disepakati. Namun Deni bilang, masih menunggu waktu.

“Kami meminta waktu untuk menyelesaikan kerjasama dengan Indramayu melalui Badan

Usaha Pelaksana (BUP) investor untuk tahun 2022. Kalau suplesi 40 lt/dt untuk Cikalahang nanti, akan bersumber dari Telaga Remis atau Telaga Nilem sesuai debit yang mencukupi,” ujarnya.

Ia menambahkan, PAM Tirta Kamuning dibantu pengelolannya melalui investor atau pihak ketiga. Hal ini dikarenakan ketidaksanggupan untuk membangun infrastruktur dari Kuningan ke Indramayu. Namun kata Deni, jika ke Kabupaten Cirebon tidak memerlukan investor, mengingat jaraknya cukup dekat.

Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Cakra Suseno menyampaikan, bahwa Kabupaten Cirebon saat ini tengah menghadapi persoalan tentang pengelolaan air, akibat adanya perusahaan swasta yang mengelola air baku seperti PDAM yang bersumber dari Kuningan. Menurutnya, hal semacam itu seolah tidak memiliki aturan. Padahal pengelolaan air merupakan ranah kewenangan Pemerintah Daerah.

Menanggapi itu, Deni menyampaikan, Fahmi alias pihak swasta yang menjual air baku ke Kabupaten Cirebon pada dasarnya telah melanggar UU Nomor 17 tentang pengelolaan dan SPAM. PAM Tirta Kamuning juga telah menindaklanjuti, hanya saja belum bisa berbuat banyak, akibat berlindung di bawah surat izin.

“Kami telah melakukan komunikasi dengan Fahmi, namun Fahmi berlindung di bawah surat izin yang bahkan sudah tidak berlaku. Juga dengan perlindungan ‘baret merah,’” kata Deni.

Ia menambahkan, pada prinsipnya PDAM tidak dapat melakukan tindakan terhadap Fahmi. “Karena yang berhak adalah Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sebagai pemilik mata air, atau, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan memberikan ketegasan aturan ke pelanggannya,” ungkap Deni.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Mad Saleh, berjanji akan memberikan saran untuk Pemda Kabupaten Cirebon dalam upaya ketegasan.

“Kalau perlu ada aturan untuk pelanggan agar tidak membeli air minum dari perusahaan swasta yang tidak memiliki izin,” katanya. •Sar



## Komisi III Dukung Program Parkir Khusus

Dengan potensi parkir yang cukup banyak. Dishub Kabupaten Cirebon berencana akan mengelola 2 jenis parkir, yakni : Parkir Liar dan Parkir Khusus. Apakah akan menaikkan retribusi?



Foto: foto: dok serivan

Dalam rangka tukar pendapat pengelolaan parkir dan Penerangan Jalan Umum (PJU), Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi DPRD Kabupaten Majalengka. Kunker ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Banmus.

Hadir saat kunjungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Majalengka dan Dishub Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Syahril Romadhony, menyampaikan, sebelum pandemi Covid 19, Kabupaten Majalengka yang terkenal potensi wisata daerah, telah

melambungkan retribusi parkir. Namun, akibat pandemi, PAD retribusi parkir telah mengalami penurunan hingga 50 persen.

Akibatnya, dalam mengatasi hal itu, ujar Syahril, Kabupaten Majalengka telah membuat pengelolaan pajak parkir khusus, yang terdiri dari pajak parkir rumah sakit dan pajak parkir jalan umum.

Pernyataan Syahril pun, dibenarkan oleh Dishub Kabupaten Majalengka. Namun Dishub Majalengka bilang, saat ini pengelolaan parkir khusus belum berjalan dengan maksimal.

“Syarat untuk dapat men-

gelola parkir khusus seperti rumah sakit, harus dilakukan dengan cara pelelangan, namun Dishub Majalengka belum dapat melakukan program pelelangan itu karena masih pandemi,” ungkapnya.

Menurutnya, sejauh ini tata kelola parkir di Kabupaten Majalengka sendiri mengacu pada Perda Nomor 10 tahun 2010, tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir.

Namun Dishub Majalengka menilai, pengelolaan parkir di Kabupaten Majalengka saat ini terkendala dengan regulasi

parkir jalan nasional. Pasalnya Dishub Majalengka tidak boleh mengelola tarif parkir di jalan nasional yang berada di wilayah Majalengka. Karena itu, saat ini Dishub Majalengka hanya mengelola parkir jalan umum.

Padahal, Dishub Majalengka telah menargetkan pada tahun 2020, akan ada retribusi parkir per tahun untuk jalan umum sekitar Rp 1 milyar, sedangkan untuk parkir khusus Rp 612 juta.

“Hanya saja karena pandemi jadi tidak sesuai target,” katanya.

Sementara itu, Dishub Kabupaten Cirebon juga mengatakan, akan ada perencanaan pengelolaan parkir di Kabupaten Cirebon yang mengarah pada parkir khusus.

“Rencananya melangkah dari pasar Pemda terlebih dahulu,” ungkapnya.

Selain itu, Dishub Kabupaten Cirebon juga mengatakan dengan banyaknya potensi pengelolaan parkir di Kabupaten Cirebon. Dishub Kabupaten Cirebon berencana akan melakukan terobosan parkir liar untuk dimasukkan kedalam parkir khusus.

“Pelaksanaan penertiban untuk parkir liar di Kabupaten Cirebon, setiap tahun diperbaharui dan ditingkatkan targetnya sesuai dengan potensi,” katanya.

Terakhir, Dishub Kabupaten Cirebon juga sedang merencanakan program parkir non tunai QRIS bekerjasama dengan Bank Indonesia. Program ini akan diterapkan di pasar sumber dan hutan kota.

Mendengar itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto, menyarankan agar Dishub Kabupaten Cirebon bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga terlebih dahulu, dalam mengoptimalkan pengelolaan parkir. •Dul



## Komisi IV Kaji Kenaikan Anggaran Pendidikan

Pasca mengunjungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan sebesar 30 persen dari pagu. Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pun berencana mengkaji terlebih dahulu.



Foto: foto dok setwan

Dalam rangka mengetahui Indeks Kelola Pendidikan yang ada di Kabupaten Pemalang, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pemalang.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Disdikbud Kabupaten Pemalang Mualip.

Mualip mengaku, Pemerin-

tah Kabupaten Pemalang berhasil meraih penghargaan Indeks Kelola tahun 2019, untuk kategori ketepatan alokasi pendidikan, dari Katadata Insight Center.

"Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Pemalang Junaedi," ujarnya.

Mualip menjelaskan, penghargaan itu merupakan suatu pengakuan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang

dalam melakukan keberpihakan pada pendidikan. "Alokasi anggaran Pendidikan di Pemerintah Kabupaten Pemalang, melebihi ketentuan yang ada di undang-undang," katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina, pun menanyakan besaran anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan di Kabupaten Pemalang, khususnya dalam

pengalokasian untuk kesejahteraan guru honorer.

Mualip bilang, besaran kenaikan kesejahteraan guru honorer yakni sebesar Rp 200 ribu yang mulai diberikan pada September lalu. Sedangkan akumulasi besaran untuk kenaikan guru dan pegawai honorer sebesar Rp 9,1 milyar dalam setahun," ujarnya.

"Dalam amanat undang-undang alokasi anggaran pendidikan itu 20 persen, tapi saat ini kita mengalokasikannya hampir 30 persen," katanya.

Namun, kata Mualip, terdapat syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para guru honorer yakni, harus terdaftar pada data Disdikbud Kabupaten Pemalang per 31 Desember. Adapun bagi guru yang baru terdaftar di awal tahun, maka belum bisa mendapatkan kenaikan kesejahteraan.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan mutu para guru, Mualip menyampaikan, setiap tahun Disdikbud melaksanakan pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi. Dengan tujuan sebagai motivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme guru serta kepala sekolah.

"Agenda tahunan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat sekolah, kecamatan hingga kabupaten. Dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja dan prestasi guru, sehingga dapat meningkatkan kualitas peserta didik," katanya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Hj Nana Kencanawati sangat mengapresiasi, langkah Pemerintah Kabupaten Pemalang yang telah mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan melebihi amanat undang-undang. Sehingga dengan

anggaran yang besar tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kedepannya.

Ia juga mengatakan, langkah Disdikbud Kabupaten Pemalang ini, akan ia kaji untuk menjadi

solusi persoalan pegawai dan guru honorer di Kabupaten Cirebon.

"Ya nanti kita kaji terlebih dahulu fokus kebutuhan anggarannya tahun depan," pungkasnya. •Sra



## Fraksi Partai Gerindra:

### Berjuang Demi Martabat Masyarakat Kabupaten Cirebon

Indonesia raya bukan sebatas lagu nasional, namun harapan dan cita-cita luhur yang harus diwujudkan. Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon terus bergerak, mengepak sayap perjuangan. Mimpinya, mengangkat derajat masyarakat. Bagaimana caranya?



Foto: foto: dok gerindra

Harapan besar bergelora dalam Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Cirebon. Mereka berniat mulia untuk mengangkat harkat, martabat, serta derajat masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan memastikan setiap anggota selalu ada untuk masyarakat. Mereka wajib mendengar keluh kesah dan aspirasi rakyat.

Banyak persoalan yang dirasakan masyarakat. Umumnya, mereka mengeluhkan persoalan kesehatan dan pendidikan. Pelayanan kesehatan dirasa belum maksimal. Terlebih didapatkan pada situasi pandemi Covid-19, semua fokus pada kasus covid-19.

Pada persoalan pendidikan,

Fraksi Gerindra menyorot pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di masa pandemi. Pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh (PJJ) atau daring sebetulnya baik. Hal itu sebagai upaya memutus persebaran virus Covid-19.

Sayangnya, pembelajaran daring dinilai belum optimal. Pasalnya siswa harus bisa beradaptasi dengan model pembelajaran gaya baru. Di sisi lain, banyak siswa yang tidak bisa membeli kuota untuk belajar. Bahkan, cukup banyak yang tidak memiliki Hand Phone.

Pelaksanaan pembelajaran daring tidak serta membuat siswa diam dirumah. Rendahnya kesadaran siswa tentang protokol covid-19 juga membuat kebijakan

pembelajaran daring dinilai kurang efektif. "Setelah selesai belajar dari rumah, para siswa tetap bermain keluar dari rumah dan berkerumun,"ujarnya.

Fraksi Gerindra pun bergerak cepat. Mereka menggelar rapat pertemuan khusus membahas isu-isu terkini, tak terkecuali soal kesehatan dan pendidikan. Hal itu dimaksudkan agar program yang dilaksanakan Pemda tepat dan bermanfaat. Sehingga, visi mengangkat harkat, martabat, serta derajat masyarakat kabupaten Cirebon dapat terwujud.

Berkenaan dengan permasalahan pendidikan, Ketua Fraksi Gerindra Nana Kencanawati mengunjungi sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon. Hal itu dilaku-

kan sebagai upaya memantapkan strategi pembelajaran di tengah pandemi covid-19 dan mencegah penyebaran covid-19 di klaster pendidikan.

"Ibu inginnya siswa bisa segera belajar tatap muka. Karena kemungkinan kualitas siswa tahun ini bisa menurun drastis. Tapi kan kita mengutamakan keselamatan. Karena sekarang korban pasien covid-19 yang meninggal semakin bertambah. Rumah sakit sudah penuh. Tim Medis dan Gugus Tugas sudah lelah," untkannya.

Adapun berkenaan dengan permasalahan kesehatan, Nana mengaku sedang memperjuangkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kini, ia sedang mendata masyarakat yang masih belum memiliki KIS.

Nana juga menyadari, pandemi covid-19 telah membuat perekonomian masyarakat terpukul. Hal itu diketahui saat ia mengunjungi tempat industri dan usaha masyarakat. Dalam kunjungan tersebut

banyak pemilik usaha yang terpaksa menutup industri dan tempat usahanya. "Kasihannya mereka yang tidak punya penghasilan tetap." ujanya.

Nana menjelaskan, persoalan covid-19 tidak selesai jika hanya mengandalkan peran dari pemerintah. Pasalnya sudah banyak anggaran pemerintah daerah yang di-*refocusing*-kan untuk penanganan covid-19. Karena itu, Nana mengingatkan agar semua elemen masyarakat peduli. "Kalo masyarakat tidak segera menyadari bahwa covid ini bisa terus berkembang, ya susah," pungkasnya.

Perjuangan Fraksi Gerindra Kabupaten Cirebon bukan hanya pada dua persoalan diatas. Namun setiap persoalan yang ada mereka urai untuk diselesaikan. Tentu sesuai tugas dan fungsi legislatif. Tujuan besar yang hendak dicapai adalah mengangkat derajat masyarakat Kabupaten Cirebon. Membuat mereka sejahtera dan bahagia.

#### Berikut Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra Periode 2019-224



Nana Kencanawati, S.Pd



Hj. Eryati



Sofatillah, S.H



Drs. H. Subhan



H. Mulus Trisla Ageng, S.E



Sofwan, S.T.



R. Cakra Suseno, S.H

## Nana Kencanawati : Berbuat Baik Merupakan Kebahagiaan



Komitmennya dekat dengan rakyat tak perlu diragukan. Perjuangan mengurai persoalan tak pernah setengah hati. Adalah Nana Kencanawati, Perempuan tangguh dari Partai Gerindra yang berjuang dalam Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon.

Ia merupakan sosok panutan bagi banyak orang. Meski usianya tak lagi muda (61 Thn), ia selalu tanggap dalam merespon setiap keluhan dan aspirasi masyarakat. Program prioritasnya saat ini tentang pendidikan dan kesehatan.

Wujud komitmennya berjuang untuk masyarakat adalah melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Ia turut dalam menyusun strategi pembelajaran daring untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon. Selain itu, ia sedang memperjuangkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk kebutuhan pengobatan masyarakat.

Selain itu, banyaknya pro-

gram bantuan untuk masyarakat tidak lepas dari sorotan. "Saya turut mengawasi bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa. Karena masyarakat sangat membutuhkan pengobatan, maka fokus kami yaitu memperjuangkan KIS," ungkap Nana.

Sejak kecil, Nana merupakan sosok yang peduli terhadap sesama. Baginya, berbagi kepada sesama menjadi semacam kewajiban. Itu pula yang menjadi pegangan hidupnya. Berbagi bukan sekedar soal uang. Namun ketika keberadaannya mampu membuat orang lain bahagia, nilainya tentu lebih dari uang.

Nana merupakan politisi yang berangkat dari seorang pendidik. 36 Tahun lamanya ia mengabdikan diri sebagai guru di SMAN 1 Lemahabang. Sebuah pengabdian panjang yang telah banyak melahirkan generasi terbaik. Ia juga dikenal sebagai guru yang peduli terhadap

keadaan siswa dan lingkungan sekolahnya.

Dari masa ke masa, ia selalu hadir bagi siapapun yang membutuhkan. "Saya ingin melakukan apa yang bisa saya bantu. Karena membantu masyarakat menjadi kebahagiaan tersendiri, dan itu tidak bisa ditukar dengan uang," katanya

Nana juga dikenal sebagai organisatoris. Ia aktif dalam organisasi Aisyiyah Kabupaten Cirebon. Ia menginisiasi gerakan yang membangun kemandirian masyarakat. Mengadakan beragam kegiatan yang bermanfaat bagi umat. "Di Aisyiyah banyak sekali program-program kemasayarakatan. Kita lillahi Ta'ala. Dana sendiri. Ongkos sendiri," ungkapnya.

Awalnya Nana tak pernah terpikir untuk menjadi dewan. Sang anak yang memahami kualitasnya, memberinya masukan. "Ibu kan senang berbagi dengan masyarakat. Kalau ibu ingin bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas lagi, maka ibu harus jadi Dewan", katanya.

Masukan sang anak itulah yang membuatnya menjadi anggota dewan. Hingga kini ia masih terngiang dengan ucapan anaknya. Keyakinannya tumbuh untuk bergerak dalam perjuangan partai. Tahun 2019 ia memutuskan untuk maju pada Pileg Tingkat Kabupaten. Ia berdoa, "Ya Allah, jika memang saya bermanfaat ketika menjadi dewan untuk dunia dan akhirat. mudahkanlah. Namun jika tidak, maka jangan Ya Allah," pungkasnya. •Dul

## Kebun Pisang Bumdes Sindang Kempeng Berdayakan Warga

Keberadaan Kebun Pisang Bumdes Sindang Kempeng telah memberi banyak manfaat bagi warga sekitar. Terlebih bagi yang terdampak Covid-19. Mereka diberdayakan untuk mengelola kebun.



Foto: foto: sarah/dk

**H**amparan sawah dan perkebunan luas terbentang. Pohon-pohon berjajar di sepanjang jalan. Nuansa perdesaan masih sangat terasa ketika memasuki Desa Sindang

Kempeng Kecamatan Greged. Jauh dari hiruk pikuk bangunan megah layaknya di kota. Terlihat, banyaknya pohon pisang yang mendominasi lahan. Ternyata, pohon pisang yang

mendominasi area itu adalah bagian dari aset Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sindang Kempeng. Bermula sejak akhir tahun 2019. Bumdes Sindang Kempeng mulai memanfaatkan lahan ku-

rang produktif untuk disulap. Mereka pun mulai menanam dan mengelola menjadi kebun pisang. Sekarang, siapa sangka, lahan yang awalnya tidak produktif itu, kini telah tumbuh 3.800 pohon pisang berdiri tegak tumbuh subur. Bumdes Sindang Kempeng berhasil mengelola kebun pisang di atas lahan seluas 5 hektar.

“Jenisnya juga bermacam-macam, ada Pisang Lampung dan Pisang 9 kuningan. Kalau panen, 90 persen hasil panen pisang di sini juga lebih segar dan elok. Berani diadulah dengan kualitas pisang dari Lampung,” kata Robi, Sekretaris Desa Sindang Kempeng saat ditemui.

Ide mengelola kebun pisang, awalnya dirumuskan oleh Diki, Ketua Bumdes Sindang Kempeng. Diki yang lulusan ilmu pertanian itu resah, saat melihat banyaknya pohon pisang yang ada di Desa Sindang Kempeng tidak diakomodasi. Padahal ia menilai bahwa pohon pisang itu merupakan potensi desa yang perlu dikembangkan.

“Diki bilang disini kan banyak pohon pisang, gimana kalau dikembangkan serta dijadikan ikon yang beda dari yang lain,” ungkap Robi.

Untuk melanjutkan idenya itu, ia pun membahasnya pada rapat Bumdes. Setelah dirapatkan bersama, rencana itu akhirnya disetujui. Dari situ, mulailah Bumdes mencari bibit-bibit unggul di sekitar desa hingga ke luar daerah. Saat kebun pisang itu sudah terlihat subur. Bumdes berencana menjadikan pohon pisang sebagai ikon Desa Sindang Kempeng.

Keberadaan perkebunan pisang yang dikelola Bumdes itu, telah membawa banyak manfaat bagi warganya. “Ketika ada warga yang akan menggelar hajatan



Foto: freepik.com

dan membutuhkan pisang, warga bisa langsung panen di kebunnya. Untuk harganya tentu berbeda dari beli di pasar. Dari penjualan pisang itu, hasilnya juga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa. Alhamdulillah, sedikit sedikit meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Selain itu, kata Robi, banyak

masyarakat yang mulai menanam tumbuhan lain di sekitar kebun. Dari remaja, bapak-bapak serta ibu-ibu, dengan senang hati berkontribusi mengelola kebun pisang itu. Bahkan pada saat penanaman pertama, seluruh warga Desa Sindang Kempeng pun turut serta berduyun-duyun menanam hingga saat panen pertama.



Tidak hanya mengelola kebun pisang. Bumdes Sindang Kempeng juga telah ikut serta meningkatkan perekonomian desa. Terlebih, di masa pandemi seperti sekarang. Robi bilang, Bumdes Sindang Kempeng telah menyerap tenaga kerja dari warganya yang kehilangan pekerjaan karena terdampak Covid-19.

Melalui perkebunan pisang yang dikelola Bumdes, warga yang tidak bekerja dipersilahkan untuk berkebun disana.

“Kami mengarahkan warga bekerja di sana sambil bersama-sama mengurus kebun pisang. Bukan cuma pisang, dari Bumdes juga menyediakan bibit unggulan singkong dan um-

bi-umbian untuk ditanam warga di setiap ladangnya,” ujar Robi.

Rencananya, Bumdes Sindang Kempeng juga akan mengolah pisang yang dipetik dari perkebunannya itu menjadi keripik atau makanan ringan lainnya. Robi mengatakan, mereka akan membentuk kelompok usaha terlebih dahulu di setiap blok yang ada di Desa Sindang Kempeng.

“Di sini ada 5 blok, Bumdes akan membuat lima kelompok. Jadi tiap kelompok membuat olahan berbeda dari bahan dasar pisang, tanpa menghilangkan ikon. Itu sudah didiskusikan bersama namun belum dapat direalisasikan, semoga secepatnya pasca pandemi ini,” ungkapnya.

Bumdes Sindang Kempeng juga mengatakan di awal tahun nanti, penanaman pohon pisang akan terus dilakukan dalam mengembangkan potensi desa. Hal itu akan memberdayakan lahan luas yang ada di setiap rumah warga.

Perkebunan pisang yang telah menambah pundi ekonomi Desa Sindang Kempeng itu rencananya akan dibuat pasar penjualan terlebih dahulu. Karena hasil panennya baru dijual ke tengkulak. “Hasil Panen kita, baru bisa dijual ke tengkulak, kita akan membuat strategi agar punya pasar dan dikenal secara lebih luas,” ujarnya.

Selain akan terus mengelola perkebunan pisang, Bumdes juga berencana akan mengelola potensi wisata yang ada di Desa Sindang Kempeng, untuk menambah pundi-pundi PAD.

“Ada Curug Gelong namanya. Rencananya, bumdes akan membuat sebuah taman di lahan sebelum menuju curug. Namun, kita akan perbaiki akses jalan yang rusak terlebih dahulu, agar layak untuk dilalui pengunjung,” pungkas Robi. •Sar

## Sarwajala: Potensi Wisata Pantai Cirebon Utara

Sepanjang mata memandang terhampar hektaran empang. Kesan panas dan gersang menjadi ciri khas daerah pesisir pantai. Namun siapa sangka, sederet hutan mangrove menyambut penuh kesejukan. Sentuhan kreativitas menambah pesona pemandangan.



Foto: foto-fir/fir

Seemilir angin terasa hangat menerpa wajah. Paduan antara panasnya suhu udara pantai dan sejuknya angin begitu sempurna. Membawa ketenangan sejauh mata memandang. Amat disayangkan jika pesona pesisir tak dimaksimalkan.

Kabupaten Cirebon sebenarnya sudah menjadi alternatif wisata. Namun wisatawan baru menikmati destinasi wisata religi, budaya, dan kuliner. Padahal, bila digali lebih lanjut terdapat potensi yang dapat dikembangkan, yakni wisata pantai dengan suasana tak kalah bagusnya dengan daerah lain.

Desa Bungko Lor kecamatan Kapetakan memiliki vegetasi hutan mangrove. Selain itu, daerah ini memiliki pantai dan ham-

paran empang yang luas. Potensi alam tersebut memiliki daya tarik. Jika mampu dikembangkan dengan baik, kedepan akan dapat bersaing dengan pariwisata pantai daerah tetangga.

Selama ini mayoritas masyarakat Kabupaten Cirebon memilih berwisata pantai di Indramayu. Tentunya hal ini menjadi ironi, sebab daerah sendiri memiliki pantai namun tidak dapat dinikmati. Berangkat dari sinilah perjuangan mengembangkan destinasi wisata pantai digelorkan.

Adalah Pantai Sarwajala, yang kini tengah menggeliat menjadi tempat wisata baru bagi masyarakat Cirebon Utara. Lokasi wisata ini berada di pesisiran Sungai Bungko yang men-

jadi lalu lintas Nelayan sekitar mencari ikan di laut. "Kita baru memulai, baru ada beberapa spot," terang Samsu, pelopor adanya pantai Sarwajala.

Deretan hutan mangrove nan hijau memberikan nuansa panorama alam pesisir. Menjadikan suasana tempat wisata ini lebih alami dan sejuk. Tak ayal banyak pengunjung yang datang ke pantai Sarwajala untuk sekedar berjalan-jalan menikmati pemandangan juga berswafoto.

Pantai Sarwajala merupakan hasil inisiatif warga Desa Bungko Lor. Mereka mendapatkan ide untuk membuat tempat wisata setelah melihat begitu potensinya salah satu spot di desanya. "Awalnya saya ikut pelatihan budidaya mangrove,



kemudian ada potensi untuk dikembangkan menjadi wisata," jelasnya.

Langkah awal yang dilakukan Samsu dan warga dengan membuat tempat pemancingan. Area pemancingan berupa track bambu di sekitar mangrove. "Jadi sebetulnya karena daerah ini sering di datangi pemancing, bahkan bisa dikatakan menjadi tempat favorit. Maka kita berpikir untuk dikembangkan saja menjadi wisata macang," terangnya.

Tak disangka, spot track bambu dekat mangrove tersebut dilirik pengunjung. sehingga pengembangan yang dilakukan bukan sekedar memfasilitasi pemancing. Samsu dan warga berniat untuk membuat spot yang dapat dinikmati seluruh pengunjung pantai.

Hadirnya tempat wisata ini terbilang cukup baru, namun sudah memberikan daya tarik tersendiri bagi warga sekitarnya. "Sudah banyak pengunjung, tapi baru dari kecamatan terdekat

seperti Kecamatan Ge gesik, Suranenggala dan masyarakat Kecamatan Kapetakan," terang Kastija, Ketua BPD Desa Bungko Lor.

Pantai Sarwajala memberi dampak positif bagi perekonomian warga. "Alhamdulillah semenjak masyarakat tahu ada lokas wisata disini, banyak warga yang mendapat berkahnya. Mereka yang berjualan mengalami kenaikan keuntungan. Juga disini ada penjual hasil tangkap nelayan, pun sebagian rejekinya," jelasnya.

Sejak dibuka untuk umum enam bulan yang lalu, Pantai Sarwajala dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Pengelolaan dilakukan bertahap, sebab keterbatasan dana yang tersedia. Pihak pengelola masih banyak memerlukan perbaikan dan penambahan area wisata.

Samsu, Kastija, dan pemerintah desa berharap agar ada bantuan dan dukungan terutama dari Dinas Pariwisata. Agar

mereka bisa menambah fasilitas dan dapat menarik pengunjung lebih banyak lagi. selain dari dinas, juga dari para pelaku usaha atau swasta yang peduli pada pelestarian lingkungan.

Sejauh ini baru spot pemancingan dan track mangrove yang sudah tersedia. Sementara area pantai masih belum tertata dengan baik. "Kita sedang ajukan jembatan gantung terlebih dahulu. Selain kondisinya sudah sangat memperhatikan, juga kedepan akan menjadi ikon yang menyambut kedatangan wisatawan," jelasnya.

Hadirnya Pantai Sarwajala menjadi bukti bahwa wilayah kabupaten Cirebon bagian utara memiliki potensi wisata. Hal ini harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah agar dapat mendukung proses pengembangan potensi tersebut. Sehingga masyarakat Bungko Lor dan sekitarnya dapat lebih semangat lagi dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya.

Disamping itu, adanya destinasi wisata baru dapat menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan perekonomian. Masyarakat akan dilibatkan dalam pengelolaan tempat wisata, sebagai penyedia jasa, ataupun menjual produk oleh-oleh khas daerah sekitar. Sehingga banyak dampak positif yang akan terasa.

Lokasi wisata pantai sarwajala yang ada di Bungko Lor menambah ragam destinasi wisata Kabupaten Cirebon. Dengan adanya destinasi wisata pantai, Kabupaten Cirebon tidak hanya akan dikenal sebagai kota wali, kta udang, atau kota terasi. Namun identitas daerah khas pantura akan muncul, yakni kota bahari. •Fir

Mohamad Luthfi



## Laron Akhir Tahun

**M**aghrib menjelang. Hujan baru saja reda. Ini entah yang ke berapa, langit menumpahkan air di akhir November. Suara adzan mengema. Kami pun bergegas menuju mushola. Masih ada rintik yang lembut menyapa kulit.

Usai sholat, hari semakin gelap. Lampu-lampu menyala terang. Di teras rumah, laron-laron beterbangan, berebut mendekati sumber cahaya. Sebagian sudah terkapar jatuh di bawah lampu. Semut berdatangan menarik bangkai mereka.

Tahukah sobat, laron yang mati terkapar itu adalah laron *jomblo*. Ia tewas secara tragis karena tidak menemukan pasangan. Begitulah siklus hidup laron.

Sejatinya laron adalah rayap reproduktif. Alias rayap yang dalam proses beranak-pinak. Ia keluar sarang ketika tanah lembab diguyur hujan. Beterbangan di malam hari mendekati sumber cahaya.

Dalam waktu semalam itulah ribuan laron harus menemukan pasangan demi kelanjutan hidup kerajaan rayap. Konon satu indukan rayap dalam sehari bisa menghasilkan 30 ribu butir telur.

Nah, selain laron (rayap bersayap) ada juga koloni rayap pekerja dan prajurit, mereka tugasnya bekerja mencari makanan dan menjaga sarang. Sedangkan koloni laron bertugas melahirkan generasi baru.

Saat musim hujan adalah waktunya laron kawin atau mati karena jomblo. Laron hanya punya waktu semalam untuk menemukan jodoh. Dari ribuan itu hanya 10 persen yang menemukan pasangan.

Mereka yang berjodoh akan turun ke tanah bersama; melepaskan sayap; kemudian mencari atau membuat sarang baru di tanah. Berbulan madu dan membuat koloni baru.

Sementara yang tak menemukan pasangan mati mengenaskan. Begitulah kisah perjodohan laron dalam semalam. Sangat kompetitif. Hanya mereka yang mampu berkompetisilah yang dapat melangsungkan hidup.

Begitupun dengan Anda, dari jutaan sel sperma, Anda-lah yang memenangkan kompetisi membuahi

sel telur. Sejak di dalam rahim, kita sudah berkompetisi.

Bagaimana dengan di dunia ini? Sama, kita diperintahkan juga untuk berkompetisi. Namun, bukan berlomba menumpuk harta dan kekayaan. Kita diperintahkan untuk berkompetisi membawa bekal bagi kehidupan berikutnya.

Caranya? Berlombalah dalam kebaikan dan perangilah kemungkaran. Uniknya, kompetisi model ini tidak menuntut kita untuk meniadakan atau membunuh orang lain. Justru sebaliknya, mengajak orang lain dalam kebaikan adalah bagian dari kebaikan.

Sedangkan membunuh justru dilarang, dan harus diperangi, karena itu bagian dari kemungkaran. Dengan begitu, di dunia ini kita sebenarnya diperintahkan untuk berkompetisi mengajak sebanyak-banyaknya manusia agar terus dalam koridor kebaikan.

Kompetisi itu bukan meniadakan yang lain, tapi membuat, memperbanyak, dan memperbesar koalisi kebaikan. Koalisi kebaikan juga mengajarkan agar kita terus mengalir menjadi lebih baik dalam koridor waktu.

Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Jika, tidak maka kita masuk dalam golongan orang yang merugi. Begitulah resolusi kita lahir ke bumi.

Sayangnya, manusia seringkali terjebak dalam lupa, alpa, bahkan khilaf. Untuk itu perlu setiap saat kita memperbaharui resolusi, tekad, dan janji kita untuk senantiasa berbuat dalam kebaikan.

Untuk itu, merupakan sebuah kebaikan jika kita senantiasa terus memperbaharui resolusi. Bisa dilakukan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, atau setiap tahun. Jangan mengagap remeh, apalagi mencemooh orang yang beresolusi, meski dilakukan setiap tahun.

Jadi, tidak salah, bahkan baik, jika di akhir 2020 ini kita membuat resolusi untuk 2021. Buatlah dengan niat ibadah, dan mencapai kesempurnaan hidup.

Selamat beresolusi! Selamat tahun baru!



## SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI



Ikin Asikin, S.Sos., M.Si.  
Sekretaris DPRD Kab. Cirebon



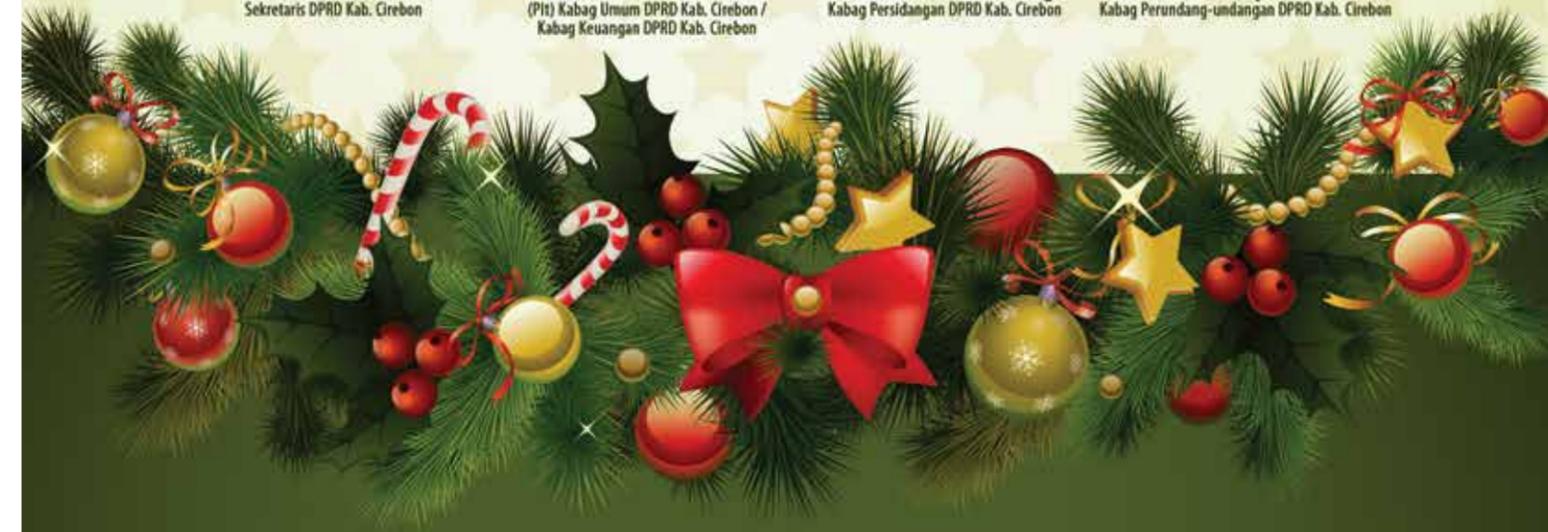
Wawan Siswandar, SE., M.Si.  
(Pit) Kabag Umum DPRD Kab. Cirebon /  
Kabag Keuangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. Raden Chaidir Susilaningrat  
Kabag Persidangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. H. Sucipto, MM.  
Kabag Perundang-undangan DPRD Kab. Cirebon



Mengucapkan Selamat

# Hari Raya Natal 2020 & Tahun Baru 2021



**PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si**  
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



**Rudiana, SE**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



**Teguh Rusiana Merdeka, SH**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



**Drs. H. Subhan**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



**Mengucapkan Selamat**

**Hari Raya Natal 2020  
& Tahun Baru 2021**